



# Pemkot Tunggu Landasan KPK

**YOGYA, TRIBUN**  
 Nyaris sebulan sejak Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 20 Agustus 2019, Proyek Saluran Air Hujan (SAH) Supomo es. mangkrak. Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menunggu landasan kebijakan dalam hal ini dari KPK maupun Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi,



**Heroe Poerwadi**  
 Wakil Wali Kota Yogya

mengatakan landasan untuk menghentikan maupun melanjutkan kembali proyek tersebut sangat penting dan sangat dinantikan pihaknya, terlebi h warga sekitar yang terdampak.  
 "Kita cari landasan itu bisa dari KPK dan LKPP. Tapi karena masih dalam pemeriksaan, maka kami harâp KPK dapat membe-

**Kalau bulan depan musim hujan, maka akan menjadikan ini terbuka dan tanah masuk ke gorong-gorong, kanan kiri jalan terkikis.**

• ke halaman 15

---

**Pemkot Tunggu**  
 • Sambungan Hal 9

ri landasan," ujarnya, Kamis (19/9).  
 Heroe menambahkan bahwa ia mengerti, baik akademisi dan juga warga sekitar, ingin proyek tersebut segera diselesaikan karena dampak yang ditimbulkan signifikan. "Jalanan hampir dikeruk dua per tiga menyisakan sepertiga. Apalagi mengeruknya dalam untuk menanam gorong-gorong yang besar. Kalau bulan depan musim hu-

jan, maka akan menjadikan ini terbuka dan tanah masuk ke gorong-gorong, kanan kiri jalan terkikis," urai Heroe.  
 Kalaupun belum bisa melanjutkan pembangunan SAH di titik tersebut, Heroe mengaku siap untuk menghentikannya. Ia pun akan segera melakukan penutupan agar kondisi di area terdampak saat ini kembali pulih dan berangsur normal.  
 "Misal menghentikan, ya udah kita uruk untuk menjaga warga tidak terganggu. Semua ini sudah kami sampaikan ke KPK. Dari sana

bilang tunggu saja surat tertulis dari kami," tambahnya.  
**Belum ada jawaban**  
 Sementara itu, Inspektur Kota Yogyakarta, Maryoto, mengatakan belum ada jawaban secara tertulis seual pihaknya melakukan konsultasi ke LKPP beberapa waktu yang lalu. "Kami tetap menunggu jawaban tertulis dari LKPP dan KPK," ungkapnya.  
 Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta Agus Tri Haryono dipanggil KPK sebagai saksi kasus dugaan suap proyek Salurah Air Hujan (SAH) Supomo di Kota Yogyakarta, Rabu (11/9).  
 Pada saat itu, tak hanya Agus yang berada di Jakarta tapi juga beberapa orang dari DPUPKP. Hal ini lantaran Pemkot Yogyakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh DPUPKP dan Inspektorat, juga mencari jalan keluar terkait proyek SAH Supomo yang mangkrak pascakejadian OTT yang melibatkan kontraktor serta 2 jaksa, dengan berkonsultasi dengan LKPP. **(kur)**



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005